



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Banten
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
Tembusan : 1. Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : Maret 2018
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Rapat Khusus FKD-MPU di Yogyakarta.**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Ketua Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Nomor : 115/-072.34/MPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Undangan Rapat Khusus Sekber MPU, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Khusus tersebut sebagai berikut :

- I. Rapat Khusus FKD-MPU dilaksanakan pada tanggal 07 s.d 09 Maret 2018 bertempat di The Jayakarta Yogyakarta Hotel & Spa Jl. Laksda Adisucipto Km. 8 Maguwoharjo - Yogyakarta, dibuka secara resmi oleh Ketua Sekber FKD-MPU.
- II. Rapat Khusus FKD-MPU dihadiri oleh para Asisten Pemerintahan/Otda atau yang mewakili, Kepala Bappeda, Kepala Biro Pemerintahan seluruh Provinsi anggota FKD-MPU, serta Pengurus Harian Sekber MPU.
- III. Adapun hasil Rapat Khusus tersebut adalah sebagai berikut :
 - A. Laporan Pertanggungjawaban Iuran Keanggotaan MPU Tahun 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Devid Putra Arda dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Realisasi penerimaan uang iuran anggota FKD-MPU Tahun 2017 sebesar Rp. 450.000.000,-, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum membayar iuran keanggotaan dikarenakan permasalahan administrasi dan akan diselesaikan Tahun 2018. Sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 414.171.348,-, dengan saldo sebesar Rp. 66.409.982,-. Semua Provinsi anggota FKD-MPU menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Iuran Keanggotaan MPU Tahun 2017.
 - B. Sehubungan telah dilakukannya rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana Asisten Pemerintahan selaku Ketua Sekber MPU semula dijabat oleh Bambang Sugiyono digantikan oleh Reswan

W. Soewardjo, pada Rapat Khusus ini dilakukan serah terima jabatan Ketua Sekber MPU dari pejabat lama ke pejabat baru.

- C. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU Tahun 2014 - 2018, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018. Pelaksanaan Rakergub direncanakan pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 bertempat di Swiss Bel Hotel, Jl. H. R. Rasuna Said No. 18 Bandar Lampung.
- Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing provinsi adalah :
 - a. Akomodasi : 5 kamar untuk Gubernur dan kelompok kebijakan.
 - b. Transportasi lokal : 2 unit kendaraan (1 unit Alphard untuk Gubernur dan 1 unit Innova untuk kelompok kebijakan).
 - Tema Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018 adalah “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama Melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU”.
 - Narasumber Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018 adalah :
 - a. Menteri Dalam Negeri.
 - b. Menteri Pariwisata.
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengharapkan kehadiran seluruh Gubernur anggota FKD-MPU dalam acara Rakergub dimaksud.
- D. Dalam Rapat Khusus ini dibahas beberapa opsi prioritas program kerjasama yang akan disampaikan kepada para Gubernur pada acara Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018. Opsi prioritas program kerjasama ini sebagai bahan masukan kepada Gubernur untuk menentukan prioritas program kerjasama FKD-MPU Tahun 2019 yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU. Adapun opsi prioritas program kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kerjasama Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan pokok-pokok usulan kerjasama sebagai berikut :
 - a. Membangun konektivitas dan integrasi basis data warga binaan sosial ODMK dan ODGJ di seluruh provinsi MPU.
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sarana dan prasarana/gedung panti bagi warga binaan sosial ODMK dan ODGJ DKI yang berasal dari provinsi lain, sementara provinsi yang bersangkutan menyediakan lokasi/lahan untuk panti dimaksud.
 - c. Dinas Sosial berkolaborasi dengan BPSDM DKI Jakarta akan memfasilitasi pelatihan bagi petugas panti provinsi lain.
 - d. Biaya operasional panti ditanggung oleh Kementerian Sosial atau provinsi yang bersangkutan.
 - e. Menyediakan aplikasi data ODMK dan ODGJ terpadu provinsi se-MPU.

2. Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah, dengan pokok-pokok usulan kerjasama sebagai berikut :
 - a. Membangun konektivitas basis data sistem informasi pangan yang ada di semua provinsi MPU, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam Big Data Pangan MPU.
 - b. Pengembangan sistem informasi pangan terintegrasi tersebut difasilitasi oleh salah satu provinsi MPU.
 - c. Provinsi anggota MPU wajib memberikan informasi pangan secara berkala kepada sesama anggota MPU melalui sistem informasi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Sekber MPU.
 - d. Sekber MPU membentuk Tim Monev guna memantau perkembangan penyediaan informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah.
 - e. Mengingat 90 % lebih kebutuhan pangan DKI Jakarta disuply dari provinsi lain, dipandang perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan provinsi lainnya dalam bentuk :
 - Kontrak bisnis beli putus.
 - Pengelolaan pangan dengan sistem resi gudang.
 - Pengelolaan bersama lahan.
 - Pembentukan perusahaan patungan.
 - Urban farming.
3. Pembentukan MPU Tourism, Trade and Investment (TTI) Center Jakarta, dengan pokok-pokok usulan kerjasama sebagai berikut :
 - a. Membangun MPU TTI Center dengan data terpadu berbasis Web - Geographical Information System (GIS) sekaligus menjadi help desk kegiatan TTI bagi 10 provinsi MPU, dengan memanfaatkan sinergi triple helix (pemda, swasta dan perguruan tinggi).
 - b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai leading facility menyediakan infrastruktur fisik (kantor) dan sistem aplikasi MPU TTI Center Jakarta (hardware dan software) berbasis Web - GIS.
 - c. Provinsi anggota MPU menyediakan contoh produk unggulan serta sarana akomodasi pada sektor TTI di wilayahnya masing-masing dengan harga khusus (best price).
 - d. Provinsi anggota MPU memfasilitasi dukungan akses MPU TTI Center Jakarta ke pelaku usaha TTI di masing-masing daerahnya.
 - e. Provinsi anggota MPU berkewajiban menyampaikan data /informasi sektor TTI yang terbaru melalui mekanisme entry data oleh petugas provinsi masing-masing.
 - f. Memberikan tugas khusus kepada Sekber MPU sebagai pengelola MPU TTI Center Jakarta melalui Keputusan Bersama Gubernur anggota MPU.

IV. Kesimpulan :

- A. Semua Provinsi anggota FKD-MPU menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Iuran Keanggotaan FKD-MPU Tahun 2017.
- B. Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018 akan dilaksanakan tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 bertempat di Swiss Bel Hotel, Jl. H. R. Rasuna Said No. 18 Bandar Lampung, tema “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

Program Kerjasama Melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU”, dengan narasumber : Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

- C. Opsi prioritas program kerjasama yang diusulkan pada Rakergub FKD-MPU XVIII Tahun 2018 adalah :
1. Kerjasama Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
 2. Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah.
 3. Pembentukan MPU Tourism, Trade and Investment (TTI) Center Jakarta.
- D. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mengharapkan kehadiran seluruh Gubernur anggota FKD-MPU dalam acara Rakergub dimaksud.

Demikian kami laporkan, mohon menjadi periksa dan diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,



GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741004 199402 1 002